

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT FIKTIF PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



TRI PUSPA WANGI

NIM. 2420216320032

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM
MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT FIKTIF PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Program Magister Kenotariatan

TRI PUSPA WANGI

NIM. 2420216320032

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

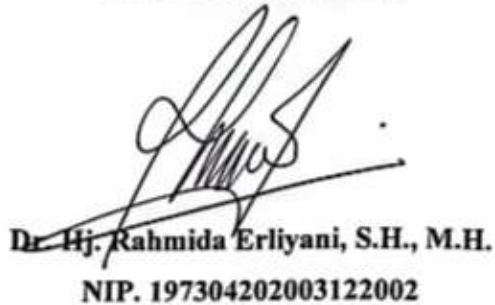
Tesis Ini
telah diperbaiki dan disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Puspa Wangi
NIM : 2420216320032
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Tri Puspa Wangi
2420216320032



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

TRI PUSPA WANGI

NIM. 2420216320032

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN
KREDIT FIKTIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 17%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 29 Juni 2026

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT FIKTIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Tri Puspa Wangi , Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Halaman

Penelitian ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik tindak pidana korupsi di sektor perbankan, khususnya kredit dan debitur fiktif yang kerap menyeret notaris ke dalam proses hukum. Dalam pemberian kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis terhadap calon debitur. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan internal bank melalui penggunaan dokumen palsu yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu dan mengkaji perlindungan hukum terhadap notaris dalam praktik perbankan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, bukan kebenaran materiil dokumen maupun keterangan para pihak. Oleh karena itu, notaris tidak dapat serta-merta dipidana sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP apabila tidak terbukti adanya unsur kesengajaan, keterlibatan aktif, maupun keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Tanggung jawab atas penerapan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan debitur berada pada pihak perbankan. Perlindungan hukum bagi notaris telah diatur dalam UU Jabatan Notaris melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar, namun penerapannya belum optimal sehingga masih terdapat risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris, penerapan *due process of law*, serta konsistensi putusan hakim sebagai rujukan dalam menentukan batas tanggung jawab notaris.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT FIKTIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Tri Puspa Wangi , Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Penelitian tesis yang berjudul *Perlindungan Hukum Notaris dalam Membuat Perjanjian Kredit Fiktif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi* ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam hal terjadinya kelalaian pada pembuatan akta yang didasarkan pada dokumen palsu yang disampaikan oleh penghadap (debitur fiktif), serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi notaris terkait kebenaran subjek hukum (calon debitur) dalam praktik perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara tindak pidana korupsi di sektor perbankan yang melibatkan praktik kredit fiktif dan debitur fiktif, di mana notaris kerap dikaitkan bahkan dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun pada dasarnya hanya menjalankan fungsi formal dalam pembuatan akta. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batasan pertanggungjawaban pidana notaris, terutama ketika terjadi penggunaan dokumen palsu oleh para pihak. Di sisi lain, masih terdapat ketidakjelasan norma terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam konteks tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta yang dibuatnya, dan tidak berkewajiban menjamin kebenaran materiil atas dokumen maupun keterangan yang diberikan oleh para pihak. Dengan demikian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terbukti adanya unsur kesengajaan, keterlibatan aktif, atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum bagi notaris perlu diperkuat melalui optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris, penerapan prinsip *due process of law*, serta penguatan regulasi yang secara tegas mengatur batas kewenangan notaris dalam melakukan verifikasi data debitur.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris harus didasarkan pada adanya kesalahan yang nyata, sedangkan perlindungan hukum menjadi penting guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap profesi notaris.

Kata kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kredit Fiktif, Pertanggungjawaban Pidana.

LEGAL PROTECTION TO NOTARIES IN DRAFTING FICTITIOUS LOAN AGREEMENTS IN CORRUPTION CRIME CASES

By:

Tri Puspa Wangi¹, Rachmadi Usman²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 126 pages

ABSTRACT

Keywords: *Notary, Legal Protection, Corruption Crime, Fictitious Loan, Criminal Liability*

This thesis aims to examine a notary's criminal liability in the event of occurrence of negligence in the making of deeds based on falsified documents submitted by the principals (fictitious debtors), as well as to analyze the forms of legal protection available to notaries concerning the validity of legal subjects (prospective debtors) within the banking sector. The research employs a normative legal method, utilizing statute, conceptual, and case-based approaches. The study is motivated by the increasing number of corruption cases in the banking sector involving fictitious loan schemes and non-existent debtors, where notaries are frequently associated with and, in some instances, held criminally liable, despite basically they merely perform formal function in drafting of deeds. This situation raises legal issues regarding the limits of notary's criminal liability, particularly in the event of utilization of fake documents by the parties. On the other land, there remains a degree of legal uncertainty concerning the extent of legal protection afforded to notaries in criminal offenses. The findings indicate that a notary is, in principle, responsible only for the formal validity of the deed he makes, and he is not obliged to guarantee the substantive truth of the documents or statements provided by the parties. Accordingly, a notary cannot be held criminally liable in the absence of proven intent, active participation, or personal benefit derived from the criminal act. Legal protection for notaries should therefore be strengthened through the optimization of the Notary Honorary Council's role, the application of the principle of *due process of law*, and regulatory empowerment that clearly defines the limits of notary's authority in verifying debtor information. In conclusion, criminal liability must be based on the existence of actual fault, while legal protection become important in order to prevent disproportionate criminalization of the notarial profession.

Certified by,



Drs. Werhan Asminto, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number : 2420216320032

² Supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul Perlindungan Hukum Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Fiktif Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk kalian yang tercinta, kedua orang tuaku Bapak (Muhammad Syafi'i Tasmin) & Mama (Siti), yang Tersayang Suamiku (Muhammad Akbar, S.T) & Anakku Tercinta (Muhammad Zain Akbar) saudariku (Megawati, S.H., Suciati, S.H., M.H. & Rima Wulandari), serta yang terhormat untuk Alm. Bapak Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan, masukan-masukan yang berharga dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. & Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Teman-teman penulis Terbaik, yaitu Sa'adiyah Nur Hizrah, Taufik Rachman, Aditya Laras Sakti Sudarsono, serta rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis



Tri Puspa Wangi
2420216320032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Teoritis	13
2. Tinjauan Konseptual	24
F. Metode Penelitian	34
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	39
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA (TIPIKOR) NOTARIS ATAS	
 KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN	
 DOKUMEN PALSU OLEH PENGHADAP DEBITUR (FIKTIF).....	40
A. Lingkup Tugas dan Wewenang Notaris Dalam UUJN Terhadap	
Kelengkapan Formil Membuat Akta	40
B. Mensrea Sebagai Unsur Dalam Pertanggung Jawaban Tindak	
Pidana Terhadap Debitur (Fiktif)	50
C. Lingkup Turut Serta Dalam Hukum Pidana Korupsi Yang	
Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP KEBENARAN	
 SUBJEK HUKUM (CALON DEBITUR) DI PERBANKAN	75
A. Batasan Tanggung Jawab Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	
(UUJN)	75
B. Tanggung Jawab Pidana Perbankan Terhadap Kebenaran Debitur	
Berdasarkan Prinsip 5C	92

C. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kredit Fiktif	107
BAB IV PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	